

DAFTAR PUSTAKA

- Agus, J. (2006). Pengaruh Sikap Wajib Pajak pada Pelaksanaan Sanksi Denda, Pelayanan Fiskus, dan Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Studi Empiris Terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Semarang. Universitas Diponegoro: Tesis Magister Akuntansi.
- Alm, J., & Beck, W. (1990). Tax Amnesties and Tax Revenues. *Public Finance Quarterly*, 18, 443-453.
- Arsal, Y. (2018). *Rasio Kepatuhan Turun Menjadi 71% di Tahun 2018*.
- Devano, S., & Rahayu, S.K. (2010). *Pepajakan: Konsep, Teori dan Isu*. Kencana
- Djuitaningsih, T., & Oktafiani, . (2019). Hubungan Penerapan PSAP No. 2 Tentang Realisasi Anggaran Dengan Tingkat Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus pada Pemerintah Kota Tanggerang Selatan).
- Downs, A., & Stetson, B. (2014). Economic and Non-Economic Factors : An Analysis of Corporate Tax Compliance. *Advances in Taxation*, 21,37-72.
- Ehrmons, F.P. (2010). Efektivitas “Sunset Policy” dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak dan Penerimaan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Sawah Besar Dua, Univeristas Indonesia: Tesis Magister Perencanaan dan Kebijakan Politik.
- Gumilang, G.S. (2016). *Metode Penelitian Kualitatif dalam Bidang Bimbingan dan Konseling*. <https://media.neliti.com/media/publications/162841ID-metode-penelitian-kualitatif-dalam-bidan.pdf>. Akses 10 Juli 2019, pukul 18.15 WIB.
- Hamzah, M.H. (2018). *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak*. Palopo: Universitas Muslim Indonesia.
- Irawan, T.E., & Purnamasari, T. (2017). Faktor-faktor Yang Berhubungan Dengan Kualitas Hidup Pasien Penderita HIV/AIDS di Poli klinik Akasia RSUD Majalenka Tahun 2016. *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia*, Vol 2, 20-33.
- Joulfaian, D. (2000). *Corporate Tax Evasion and Managerial Preferences Revie of Economics and Statistics*, 82, Hal.698-701.
- Mittone, L. (2006). Dynamic Behaviour In Tax Evasion: An Experimental Approach. *The Journal of Socio-Economics*, 35, 813-835.

- Oecd. (2013). *Cooperative Compliance: A Framework*.
- Oecd. (2014). *Compliance Risk Management: Managing and Improving Tax Compliance*.
- Prastowo, Y. & Kristiaji, D. (2019). *Pelaporan SPT Baru 61,7%, Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak rendah*.
- Prayoga, H.S. (2019). *Tax Ratio Indonesia Rendah, Ini yang Harus dilakukan Otoritas Pajak*.
- Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-13/PJ/2014 tentang *Tempat Pendaftaran Dan/Atau Tempat Pelaporan Usaha Bagi Wajib Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar, Kantor Pelayanan Pajak di Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Khusus dan Kantor Pelayanan Pajak Madya*.
- Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-21/PJ/2014 tentang *Tata Cara Pengajuan Permohonan Pembebasan dari Pemotongan dan/atau Pemungutan Pajak Penghasilan oleh Pihak Lain*.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 73/PMK.03/2012 tentang *Jangka Waktu Pendaftaran dan Pelaporan Kegiatan Usaha, Tata Cara Pendaftaran, Pemberian, dan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak, Serta Pengukuhan dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak*.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 74/PMK.03/2012 tentang *Tata Cara Penetapan dan Pencabutan Penetapan Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu Dalam Rangka Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak*.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK.03/2015 tentang *Reinventing Policy*.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206.2/ PML.01/2014 tentang *Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak*.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 268/PMK.03/2015 tentang *Tata Cara Pemberian Fasilitas Dibeaskan Dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai Atas Impor Dan/Atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu Yang Bersifat Strategis Dan Tata Cara Pembayaran Pajak Pertambahan Nilai Barang Kena Pajak Tertentu Yang Bersifat Strategis Yang Telah Dibeaskan Serta Pengenaan Sanksi*.
- Ragimun, (2013). *Analisis Implementasi Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) Di Indonesia, Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Republik Indonesia*.

- Rahayu, S., K. (2010). *Perpajakan Indonesia: Konsep dan Aspek Formal*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Republik Indonesia. (2007). *Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*. Sekretariat Negara. Jakarta\
- Republik Indonesia. (2007). *Undang – Undang Nomor 40 tahun 2007 mengenai Perseroan Terbatas*. Sekretariat Negara. Jakarta
- Republik Indonesia. (2008). *Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan*. Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 133. Sekretariat Negara. Jakarta
- Republik Indonesia. (2011). *Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akunan Publik*. Sekretariat Negara. Jakarta
- Republik Indonesia. (2018). *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara*. Sekretariat Negara. Jakarta
- Republik Indonesia. (2016). *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak*. Sekretariat Negara. Jakarta
- Salamun, A.T. (1991). *Pajak, Citra dan Upaya Pembaruannya*. Jakarta: Bina Rena Pariwara.
- Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&B*. Bandung: Alfabeta.
- Sukardji, U. (2015). *Pajak Pertambahan Nilai (PPN)*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Utomo, S. (2018). *Alasan Pemerintah Jokowi Kenapa Rasio Pajak Terus Menurun*.

Sumber dari web:

<https://www.cnbcindonesia.com/news/20180829111612-4-30732/alasan-pemerintahan-jokowi-kenapa-rasio-pajak-turun-terus>. Akses 11 Agustus 2019, pukul 20.08 WIB

<https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/mengenal-rasio-pajak-indonesia/>. Akses 26 Agustus 2019, pukul 6.12 WIB

<https://nasional.kontan.co.id/news/rasio-kepatuhan-pelaporan-spt-turun-menjadi-sebesar-71-di-2018>. Akses 9 Juli 2019, pukul 13.01 WIB.

<https://nasional.kontan.co.id/news/rasio-kepatuhan-pelaporan-spt-turun-menjadi-sebesar-71-di-2018>. Akses 15 Juli 2019, pukul 21.52 WIB.

<https://nasional.kontan.co.id/news/tax-ratio-indonesia-rendah-ini-yang-harus-dilakukan-otoritas-pajak>. Akses 19 Agustus 2019, pukul 16.53 WIB.

<https://mucglobal.com/news/read/1215/target-kepatuhan-pajak-naik-jadi-80>. Akses 11 Juli 2019, pukul 21.42 WIB.

<https://www.oecd.org/ctp/co-operative-compliance-a-framework-9789264200852-en.htm>. Akses 18 Maret 2019, pukul 17.01 WIB.

<https://www.oecd.org/tax/administration/33818656.pdf>. Akses 18 Maret 19.00 WIB.

<https://economy.okezone.com/read/2019/04/02/20/2038285/pelaporan-spt-baru-62-7-tingkat-kepatuhan-wajib-pajak-rendah>. Akses 9 Juli 2019, pukul 13.23 WIB.

<https://www.online-pajak.com/kpp>. Akses 9 Juli 2019, pukul 19.27 WIB.

<http://www.rumahkonsultanpajak.com/category/artikel-pajak/page/13/>. Akses 11 Juli, pukul 22.16 WIB.